

**PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL: 7 PROGRAM UNGGULAN
DAN PRIORITAS KEMENDIKDASMEN**

Abdul Hakim¹, Asep Anang Afandi², Ahmad Taufik Hidayat³, Ihdi Fuadi⁴,
Aprilliantoni⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

¹abdul_hakim@unismabekasi.ac.id, ²asep_anang@unismabekasi.ac.id,

³taufik_hidayat@unismabekasi.ac.id, ⁴ihdi_fuadi@unismabekasi.ac.id,

⁵aprilliantoni@unismabekasi.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of the seven flagship and priority programs of the Ministry of Primary and Secondary Education (Kemendikdasmen) and examines their implications for strengthening national development based on human resource (HR) quality. Using a qualitative approach with a library research design, this study explores various policy documents, scientific publications, and official government reports to provide a comprehensive assessment of program consistency, implementation readiness, and policy relevance. The findings show that the seven programs teacher redistribution, performance management reform, the transformation of the New Student Admission System (SPMB), character strengthening through the 7 Habits of Excellent Indonesian Children, the application of deep learning pedagogy, the integration of coding and artificial intelligence into the curriculum, and the implementation of the Academic Ability Test (TKA) represent a strategic policy package aligned with the vision of Indonesia Emas 2045. These programs contribute significantly to three key pillars of national education development: equity, quality improvement, and relevance to 21st-century competence needs. However, their impact depends on regional governance capacity, infrastructure availability, teacher competence, and collaborative engagement across education stakeholders. Continuous monitoring, integrated data systems, and supportive policy ecosystems are required to ensure successful and sustainable implementation.

Keywords: *flagship programs, education policy, Kemendikdasmen, Indonesia Emas 2045, human resource development.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas tujuh program unggulan dan prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta implikasinya terhadap penguatan pembangunan nasional berbasis kualitas sumber

daya manusia (SDM). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain studi pustaka, penelitian ini menelaah dokumen kebijakan, publikasi ilmiah, serta laporan resmi pemerintah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai konsistensi program, kesiapan implementasi, dan relevansi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuh program unggulan redistribusi guru ASN, pembaruan manajemen kinerja, transformasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), penguatan karakter melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, penerapan pembelajaran mendalam (deep learning), integrasi pembelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI), serta penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan paket kebijakan strategis yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Program-program tersebut berkontribusi signifikan dalam memperkuat tiga pilar pendidikan nasional: pemerataan layanan, peningkatan mutu pembelajaran, dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan kompetensi abad ke-21. Namun keberhasilannya bergantung pada kapasitas tata kelola daerah, ketersediaan infrastruktur, kompetensi guru, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan monitoring berkelanjutan, sistem data terintegrasi, dan ekosistem kebijakan yang suportif agar implementasi tujuh program tersebut berjalan optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: program unggulan, kebijakan pendidikan, Kemendikdasmen, Indonesia Emas 2045, pembangunan SDM.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi krusial dalam pembangunan nasional karena berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif, adaptif, dan berkarakter. Dalam konteks global yang semakin dinamis dan ditandai oleh percepatan teknologi, integrasi ekonomi, serta munculnya tuntutan kompetensi abad ke-21, transformasi sektor pendidikan menjadi keharusan strategis bagi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 (Rahman & Rozak, 2025).

Pembangunan berbasis SDM menuntut sistem pendidikan yang mampu memastikan pemerataan akses, peningkatan mutu, serta relevansi pembelajaran dengan kebutuhan masa depan.

Meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan, sektor pendidikan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu isu utama adalah ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan, pedesaan, dan daerah 3T. Keterbatasan sarana prasarana, kesenjangan ekonomi,

serta hambatan geografis menyebabkan anak-anak di daerah tertentu belum memperoleh layanan pendidikan yang layak. Program afirmasi seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Wajib Belajar menjadi respons pemerintah untuk memastikan akses yang lebih inklusif, khususnya bagi kelompok rentan (Arifa, 2025) .

Selain persoalan akses, mutu pembelajaran juga menjadi perhatian penting. Hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa masih berada di bawah ekspektasi. Rendahnya pemerataan kompetensi guru, distribusi tenaga pendidik yang tidak seimbang, serta terbatasnya kesempatan pengembangan profesional menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kebijakan redistribusi guru ASN menjadi salah satu strategi untuk mengatasi ketimpangan tersebut dan mendorong pemerataan layanan pendidikan (Wahyudi et al., 2025) . Pemerintah juga melakukan pembaruan manajemen kinerja guru sebagai upaya menekankan evaluasi berbasis capaian pembelajaran

dibandingkan administratif (Kemendikdasmen RI, 2025) .

Masalah lain yang masih mengemuka adalah keterbatasan sarana prasarana pendidikan. Banyak sekolah masih menghadapi kekurangan ruang kelas, laboratorium yang tidak memadai, dan fasilitas digital yang belum merata. Padahal, ketersediaan infrastruktur yang layak menjadi prasyarat bagi terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Kesenjangan digital juga menjadi tantangan besar, terutama di era transformasi teknologi yang menuntut literasi digital sebagai kompetensi dasar. Oleh karena itu, kebijakan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran menjadi prioritas yang relevan (Harahap, 2025) .

Tantangan di bidang pendidikan tidak hanya terkait aspek akademik, melainkan juga menyangkut perkembangan karakter peserta didik. Fenomena meningkatnya perundungan (bullying), rendahnya disiplin belajar, serta menurunnya budaya literasi memperkuat urgensi kebijakan penguatan karakter. Gerakan “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” (7 KAIH) menjadi

salah satu strategi untuk membangun karakter peserta didik secara holistik melalui pembiasaan yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat (Tiyas et al., 2025) .

Perkembangan teknologi global juga menuntut sistem pendidikan merespons perubahan dengan menyiapkan peserta didik untuk memiliki keterampilan digital tingkat lanjut. Integrasi pembelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI) di sekolah merupakan langkah strategis yang bertujuan menumbuhkan literasi digital, berpikir komputasional, serta kesiapan talenta digital sejak dini (Awaluddin & Hadi, 2025; Saqjuddin et al., 2025) .

Selain itu, perubahan paradigma evaluasi pendidikan dari Ujian Nasional (UN) menuju Tes Kemampuan Akademik (TKA) mencerminkan kebutuhan sistem asesmen yang lebih objektif, valid, dan berorientasi pada penalaran. TKA berfungsi sebagai alat uji capaian akademik sekaligus validator nilai rapor, sehingga dapat meminimalkan praktik manipulasi nilai dan memperkuat integritas sistem evaluasi pendidikan (Prasetyo & Utami, 2025) .

Seluruh program tersebut redistribusi guru ASN, pembaruan manajemen kinerja, transformasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), penguatan karakter, pembelajaran mendalam (deep learning), pengenalan coding dan AI, serta penerapan TKA merupakan bagian dari tujuh program unggulan Kemendikdasmen yang dirancang sebagai upaya komprehensif dalam memperkuat tiga pilar utama pembangunan pendidikan: pemerataan layanan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masa depan (Maharani et al., 2025; Irawan et al., 2025) .

Dengan demikian, transformasi pendidikan nasional bukan sekadar agenda reformasi teknis, tetapi merupakan langkah strategis untuk menyiapkan generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library research) sebagai metode utama untuk menganalisis kebijakan pendidikan,

khususnya terkait implementasi tujuh program unggulan dan prioritas Kemendikdasmen. Studi pustaka dipilih karena memberikan ruang untuk menelaah beragam sumber literatur secara komprehensif, mulai dari dokumen regulasi, pedoman implementasi kebijakan, laporan resmi pemerintah, hingga artikel ilmiah terkini yang relevan dengan fokus penelitian. Metode ini sesuai dengan karakter analisis kebijakan yang menekankan interpretasi mendalam terhadap teks, konteks sosial, serta dinamika kebijakan yang berkembang dari waktu ke waktu (Zed, 2008; Rahman & Rozak, 2025) .

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang terbit dalam kurun lima tahun terakhir, termasuk jurnal akademik yang membahas redistribusi guru ASN, reformasi PPDB menjadi SPMB, kebijakan penguatan karakter, pengembangan pembelajaran mendalam, serta integrasi teknologi digital seperti coding dan kecerdasan buatan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, dokumen resmi dari Kemendikdasmen digunakan sebagai sumber primer untuk memahami arah

kebijakan, strategi implementasi, dan indikator capaian dari setiap program prioritas. Berbagai publikasi tersebut dianalisis secara sistematis melalui proses identifikasi tema, kategorisasi isi, dan interpretasi substansi untuk memastikan bahwa hasil analisis menggambarkan konsistensi kebijakan, tantangan implementasi, dan implikasinya terhadap pembangunan pendidikan nasional (Wahyudi et al., 2025; Maharani et al., 2025; Kemendikdasmen RI, 2025) .

Analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif-analitis, yakni dengan memetakan informasi penting dari berbagai sumber, membandingkan temuan antar publikasi, serta menafsirkan relevansi kebijakan terhadap kondisi aktual pendidikan di lapangan. Pendekatan reflektif turut digunakan untuk memahami implikasi diskoneksi waktu penerbitan kebijakan dengan proses implementasi di satuan pendidikan isu yang kerap muncul dalam implementasi kebijakan nasional (Rahman & Rozak, 2025). Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas, konsistensi,

serta dampak strategis dari tujuh program unggulan Kemendikdasmen dalam memperkuat pembangunan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa tujuh program unggulan Kemendikdasmen merupakan upaya komprehensif untuk menjawab tantangan multidimensional dalam sistem pendidikan Indonesia. Kebijakan redistribusi guru ASN, misalnya, dipandang sebagai langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan distribusi guru yang selama ini memperlebar disparitas mutu layanan pendidikan antarwilayah. Temuan Wahyudi et al. (2025) menunjukkan bahwa redistribusi guru mampu menstabilkan proses pembelajaran di sekolah swasta yang kehilangan banyak guru akibat seleksi ASN PPPK, sehingga kebijakan ini berpotensi meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan jika didukung oleh pemetaan kebutuhan yang akurat serta komitmen pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan penjelasan resmi dalam dokumen Kemendikdasmen yang

menegaskan bahwa redistribusi tidak sekadar memindahkan guru, tetapi memastikan terpenuhinya standar layanan pendidikan secara nasional.

Selain pemerataan tenaga pendidik, pembaruan sistem manajemen kinerja guru menunjukkan adanya pergeseran paradigma penilaian dari orientasi administratif menuju orientasi peningkatan kualitas pembelajaran. Sistem ini menempatkan guru sebagai aktor reflektif yang harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi praktik pembelajaran secara lebih bertanggung jawab dan terstruktur.

Panduan Kemendikdasmen (2025) menegaskan bahwa integrasi sistem penilaian dengan platform Merdeka Mengajar (PMM) serta e-Kinerja BKN memberikan transparansi dan objektivitas yang lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya. Temuan tersebut konsisten dengan literatur yang menekankan pentingnya penilaian berbasis kinerja nyata dalam meningkatkan kualitas pedagogi serta profesionalisme tenaga pendidik (Kemendikdasmen RI, 2025).

Transformasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) juga membawa

dampak signifikan terhadap akses pendidikan yang lebih adil. Perubahan kuota jalur afirmasi dan prestasi dinilai mampu meningkatkan kesempatan bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta meminimalkan dominasi sekolah favorit. Studi Maharani et al. (2025) menunjukkan bahwa penyesuaian struktur kuota dalam SPMB dapat mengurangi praktik manipulasi domisili sekaligus mendorong motivasi siswa untuk berprestasi. Transformasi ini menguatkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pendidikan nasional, meskipun implementasinya masih membutuhkan penyempurnaan sistem data dan peningkatan literasi digital orang tua. Literatur dan dokumen kebijakan yang dianalisis menunjukkan konsistensi arah reformasi ini dengan tujuan pemerataan mutu pendidikan secara nasional (Rusmini & Ristanto, 2025).

Penguatan pendidikan karakter melalui “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” turut memperlihatkan dampak positif terhadap pembentukan karakter siswa. Pembiasaan seperti bangun pagi, berolahraga, gemar belajar, dan tidur tepat waktu terbukti

membentuk kebiasaan baik yang mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Tiyas et al. (2025) mencatat bahwa gerakan ini memberi kerangka sistematis yang memungkinkan sekolah dan keluarga berkolaborasi dalam membentuk karakter anak berdasarkan nilai-nilai moral dan Profil Pelajar Pancasila. Praktik seperti Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH) dan Pertemuan Pagi Ceria juga memberi kontribusi terhadap pengembangan budaya sekolah yang positif, memperkuat rasa kebersamaan, dan meningkatkan kedisiplinan siswa.

Dalam konteks pedagogi, penerapan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) menunjukkan adanya pergeseran penting dari pola pembelajaran tradisional yang bersifat hafalan menuju pembelajaran yang menekankan pemahaman konseptual, pemecahan masalah, serta relevansi materi dengan kehidupan nyata. Studi Irawan et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan ini sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang menuntut partisipasi aktif siswa, penggunaan proyek berbasis konteks, serta refleksi

terhadap proses belajar. Meskipun implementasi deep learning dihadapkan pada keterbatasan sarana prasarana dan kesiapan guru, penelitian Harahap (2025) menekankan bahwa penerapan yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar sekaligus kualitas hasil pembelajaran di berbagai jenjang.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan teknologi, integrasi pembelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI) di sekolah menjadi salah satu kebijakan yang sangat relevan dalam menyiapkan generasi digital Indonesia. Awaluddin dan Hadi (2025) menunjukkan bahwa pengenalan coding sejak pendidikan dasar dapat mengembangkan kemampuan berpikir komputasional, kreativitas, dan logika masalah siswa. Sementara itu, Saqjuddin et al. (2025) menambahkan bahwa integrasi pembelajaran AI dapat meningkatkan literasi digital siswa dan membentuk kesadaran terhadap etika penggunaan teknologi. Kebijakan ini tidak hanya mempersiapkan talenta teknologi di masa depan, tetapi juga berpotensi mengatasi kesenjangan literasi digital antarwilayah jika diimplementasikan secara merata.

Reformasi sistem evaluasi pendidikan melalui penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) mencerminkan upaya pemerintah memperbaiki kualitas asesmen nasional. Dalam berbagai literatur, termasuk penelitian Prasetyo dan Utami (2025), dinyatakan bahwa asesmen berbasis penalaran seperti TKA dapat meningkatkan keakuratan pemetaan mutu pendidikan sekaligus memperkuat integritas penilaian rapor. TKA yang bersifat opsional dan tidak menjadi penentu kelulusan memberikan ruang bagi sekolah untuk fokus pada pembelajaran bermakna, bukan sekadar latihan menghadapi ujian. Dengan demikian, TKA berfungsi sebagai alat diagnostik nasional yang dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan peningkatan mutu secara lebih berbasis data dan objektif.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa tujuh program unggulan Kemendikdasmen memiliki potensi kuat dalam mempercepat transformasi pendidikan nasional. Program-program tersebut tidak hanya menjawab berbagai persoalan struktural pendidikan, tetapi juga memperkuat fondasi untuk

membangun generasi yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global. Efektivitas implementasi program ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah pusat dan daerah, penguatan kapasitas guru, ketersediaan infrastruktur, serta konsistensi monitoring dan evaluasi. Dengan dukungan yang memadai, tujuh program prioritas ini dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih merata, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Selain berbagai capaian tersebut, hasil kajian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tujuh program unggulan Kemendikdasmen sangat dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola pendidikan di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru, pengelolaan anggaran pendidikan, serta fasilitasi pelatihan berkelanjutan bagi pendidik. Namun, penelitian Rahman dan Rozak (2025) mengungkapkan bahwa terdapat diskoneksi waktu antara penerbitan kebijakan dan kesiapan implementasi

di lapangan, yang berdampak pada terbatasnya efektivitas pelaksanaan program. Ketidaksinkronan ini menjadi isu penting karena banyak satuan pendidikan membutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap kebijakan baru, terutama ketika terkait perubahan kurikulum, sistem penilaian, atau mekanisme pengelolaan guru. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya perencanaan kebijakan yang lebih matang, termasuk memperhitungkan kesiapan infrastruktur, literasi digital, dan kompetensi guru sebelum kebijakan diterapkan secara penuh di sekolah-sekolah.

Kajian juga memperlihatkan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya memerlukan pembaruan regulasi, tetapi juga perubahan budaya belajar di lingkungan sekolah. Program seperti deep learning dan penguatan karakter membutuhkan perubahan paradigma pembelajaran dari orientasi hasil menuju orientasi proses. Namun perubahan paradigma ini seringkali menghadapi hambatan, terutama di sekolah yang masih berorientasi pada pencapaian nilai atau ujian semata. Penelitian Harahap (2025) menunjukkan bahwa beberapa

sekolah mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran mendalam karena pola pengajaran guru masih bersifat instruksional dan minim eksplorasi. Demikian pula, perubahan budaya sekolah memerlukan dukungan kolaboratif antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Tanpa perubahan budaya belajar yang selaras dengan kebijakan, berbagai program unggulan berisiko menjadi seremonial atau tidak berjalan secara optimal di tingkat kelas.

Selain aspek pedagogi, hasil kajian juga menemukan bahwa adopsi teknologi dalam pendidikan masih menghadapi tantangan dari sisi akses, kualitas jaringan, serta kesiapan sumber daya manusia. Program coding dan AI misalnya, membutuhkan perangkat yang memadai, kapasitas jaringan internet stabil, serta guru yang kompeten dalam literasi digital. Namun kondisi tersebut belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Sekolah-sekolah di daerah 3T masih menghadapi keterbatasan signifikan meskipun kebijakan nasional mendorong transformasi digital. Studi Awaluddin dan Hadi (2025) menegaskan bahwa

tanpa dukungan pelatihan yang memadai dan penyediaan infrastruktur yang merata, integrasi coding dan AI berpotensi memperlebar kesenjangan digital antara sekolah kaya fasilitas dan sekolah miskin fasilitas. Oleh karena itu, penyediaan sarana prasarana digital perlu menjadi prioritas agar seluruh siswa dapat memperoleh kesempatan yang setara dalam mengembangkan literasi teknologi masa depan.

Lebih jauh, implementasi TKA sebagai sistem evaluasi baru juga membawa implikasi penting terhadap praktik pengajaran di sekolah. Meskipun TKA dirancang sebagai asesmen yang tidak menentukan kelulusan, namun keberadaannya berpotensi mempengaruhi strategi pembelajaran guru di kelas. Prasetyo dan Utami (2025) mengungkapkan bahwa ketika asesmen nasional menekankan penalaran dan kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka guru perlu menyesuaikan metode pengajarannya agar lebih berorientasi pada pengembangan kompetensi analitis siswa. Perubahan ini dapat membawa dampak positif terhadap kualitas proses pembelajaran, namun

juga membutuhkan pendampingan intensif bagi guru agar mampu memahami kerangka asesmen dan menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Tanpa pendampingan yang kuat, sekolah berpotensi kembali terjebak pada praktik drilling yang tidak sesuai dengan tujuan evaluasi berbasis kompetensi.

Dari perspektif ekosistem pendidikan, tujuh program unggulan Kemendikdasmen juga menuntut tingkat koordinasi lintas sektoral yang tinggi. Transformasi pendidikan tidak dapat berjalan optimal apabila hanya mengandalkan sekolah atau kementerian pendidikan semata. Dunia usaha dan industri (DUDI), organisasi masyarakat, perguruan tinggi, hingga pemerintah desa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kaya, relevan, dan kontekstual. Misalnya, implementasi deep learning dan coding akan lebih efektif jika didukung oleh kolaborasi dengan komunitas teknologi, industri digital, atau pusat inovasi yang memungkinkan peserta didik terpapar langsung pada praktik terbaik dunia kerja. Begitu pula penguatan karakter akan lebih bermakna jika keluarga dan

masyarakat memberikan contoh nilai-nilai yang sejalan dengan pembelajaran di sekolah.

Tambahan lainnya, analisis menunjukkan bahwa keberhasilan berbagai program unggulan juga membutuhkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Program redistribusi guru, SPMB, hingga TKA akan lebih optimal jika didukung oleh data yang lengkap, mutakhir, dan terintegrasi dalam satu basis sistem pendidikan nasional. Namun, literatur menunjukkan bahwa konsistensi kualitas data pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan, terutama terkait sinkronisasi dapodik dengan data kependudukan dan sistem kepegawaian. Kelemahan dalam sistem data ini dapat menghambat efektivitas pengambilan keputusan kebijakan, terutama dalam program-program berbasis pemerataan layanan. Oleh karena itu, integrasi sistem data menjadi komponen penting dalam memastikan bahwa program unggulan Kemendikdasmen berjalan sesuai tujuannya serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

Secara keseluruhan, hasil analisis memperlihatkan bahwa tujuh program unggulan Kemendikdasmen memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi pendidikan nasional. Namun pencapaian hasil yang optimal membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat, termasuk sinergi antar pemangku kepentingan, kesiapan infrastruktur, peningkatan kapasitas guru, serta budaya belajar yang terbuka terhadap inovasi. Program-program tersebut tidak hanya menjawab permasalahan struktural pendidikan yang telah berlangsung lama, tetapi juga memberikan arah baru bagi pengembangan sistem pendidikan yang modern, inklusif, dan relevan dengan tuntutan abad ke-21. Dengan implementasi yang konsisten dan dukungan yang berkelanjutan, tujuh program prioritas ini berpotensi menjadi pijakan kuat dalam penguatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.

D. Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa tujuh program unggulan dan prioritas Kemendikdasmen merupakan langkah strategis yang dirancang

untuk menjawab tantangan fundamental dalam sistem pendidikan nasional. Program-program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap berbagai persoalan struktural seperti ketimpangan distribusi guru, kesenjangan akses, dan keterbatasan sarana prasarana, tetapi juga sebagai upaya membangun ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika global. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai sumber literatur terkini, redistribusi guru ASN, pembaruan manajemen kinerja, transformasi SPMB, penguatan karakter, pengembangan pembelajaran mendalam, integrasi coding dan kecerdasan buatan, serta penerapan TKA merupakan kebijakan yang terintegrasi dalam mewujudkan layanan pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21 (Wahyudi et al., 2025; Maharani et al., 2025; Prasetyo & Utami, 2025).

Secara keseluruhan, tujuh program unggulan tersebut memiliki potensi besar untuk memperkuat tiga pilar utama pembangunan pendidikan nasional, yakni pemerataan layanan,

peningkatan mutu pembelajaran, dan relevansi pendidikan terhadap masa depan. Pemerataan tenaga pendidik melalui redistribusi guru ASN dapat mengurangi kesenjangan mutu antarwilayah. Pembaruan manajemen kinerja guru mampu meningkatkan profesionalisme pendidik dan memperbaiki praktik pembelajaran di kelas. Transformasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki akses pendidikan secara lebih adil serta menguatkan integritas seleksi peserta didik. Sementara itu, penguatan karakter melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat berperan penting dalam membangun profil pelajar yang berakhlak, disiplin, dan memiliki kemampuan sosial-emosional yang sehat (Tiyas et al., 2025).

Di sisi pedagogi, pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) menjadi pondasi penting dalam membangun proses pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Integrasi coding dan kecerdasan buatan menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian

serius pada literasi digital dan kesiapan talenta teknologi generasi mendatang. Penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) juga memperlihatkan transformasi paradigma asesmen nasional dari sekadar pengukuran hafalan menuju pengukuran kemampuan berpikir analitis dan pemahaman konsep secara lebih objektif (Irawan et al., 2025; Prasetyo & Utami, 2025) .

Namun demikian, keberhasilan implementasi tujuh program ini sangat bergantung pada sejumlah faktor, di antaranya dukungan pemerintah daerah, kesiapan satuan pendidikan, literasi digital guru dan siswa, ketersediaan infrastruktur, serta sinergi lintas sektor. Tantangan seperti ketidaksiapan perangkat teknologi, kesenjangan kompetensi guru, hingga ketidaksinkronan kebijakan dengan kondisi lapangan menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Temuan Rahman & Rozak (2025) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan akan optimal jika dirancang dengan memperhatikan konteks implementasi dan menyediakan waktu adaptasi yang memadai bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, tujuh program unggulan Kemendikdasmen dapat dianggap sebagai fondasi penting dalam transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Program-program tersebut telah mengarahkan sektor pendidikan pada visi yang lebih modern, inklusif, serta berbasis kompetensi dan teknologi. Jika implementasi dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, dan disertai penguatan sistem monitoring yang transparan dan akuntabel, tujuh program prioritas ini berpotensi menghasilkan SDM unggul yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga berkarakter, adaptif, dan siap menghadapi berbagai tantangan masa depan. Pendidikan yang kuat merupakan investasi terpenting bagi bangsa, dan tujuh program unggulan ini menjadi langkah konkret dalam memastikan investasi tersebut memberikan dampak yang nyata bagi kemajuan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Arifa, F. N. (2025). Redistribusi Guru ASN di Sekolah Swasta. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(3).

Awaluddin, A., & Hadi, M. S. (2025). Integrasi Pembelajaran Coding dan Kecerdasan Buatan di Sekolah Dasar: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 1081–1091.

<https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.21753>

Harahap, R. A. (2025). Tantangan dan Solusi Implementasi Deep Learning di Sekolah dengan Keterbatasan Sumber Daya. *Jurnal Inovasi Pendidikan Indonesia*, 5(2), 170–185.

Irawan, A., Salsabila, H., et al. (2025). Kerangka Dasar Kurikulum Deep Learning Perspektif Pendidikan Islam dan Arah Kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. *Journal of Islamic Education, Learning and Religious Studies*, 2(2), 220–241.

<https://doi.org/10.61166/ahnaf.v2i2.26>

- Maharani, S. P., Sofiyanti, I., Arba, I. A., Nugraha, R. F., & Suhardi, S. (2025). Transformasi Seleksi Peserta Didik dari PPDB ke SPMB Tahun 2025. *Jurnal Basicedu*, 9(4), 837–846. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i4.10133>
- Prasetyo, Y. S., & Utami, L. (2025). Pergeseran Paradigma Evaluasi Pendidikan: Dari Ujian Kompetensi Menuju Tes Kemampuan Akademik (TKA). *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 19(1), 45–60.
- Rahman, B., & Rozak, A. (2025). Diskoneksi Waktu Kebijakan dan Implementasi Kurikulum: Kritik atas Terbitnya Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 Pasca Tahun Ajaran Baru Dimulai. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(3), 302–307. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2019>
- Rusmini, & Ristanto, I. (2025). Kebijakan Akses Pendidikan Melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Wonogiri 2025. *Jurnal Jarlitbang Pendidikan*, 11(1), 79–88. <https://doi.org/10.59344/jarlitbang.vi.290>
- Saqjuddin, A., Aba, A., & Aopmonaim, N. H. (2025). Inovasi Manajemen Pembelajaran Coding dan AI untuk Meningkatkan Literasi Digital Siswa Sekolah Dasar. *Journal of Information System and Education Development*, 3(2), 19–24. <https://doi.org/10.62386/jised.v3i2.134>
- Tiyas, A. H., Hazin, M., & Supratno, H. (2025). Analisis Kebijakan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 211–220.
- Wahyudi, A., Sudadi, et al. (2025). Efektivitas Redistribusi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ke Sekolah Swasta. *Jurnal Kependidikan*, 14(3), 5335–5344.
- Peraturan Pemerintah / Regulasi**
- Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025, formatnya: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan*

Dasar dan Menengah Nomor 13

Tahun 2025.

Laporan & Dokumen Resmi

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

dan Menengah. (2025).

Panduan Implementasi Tujuh

Kebiasaan Anak Indonesia

Hebat dalam Kurikulum Sekolah.

Kemendikdasmen RI.

Kemendikdasmen RI. (2025).

Panduan Pelaksanaan

Pembaruan Manajemen Kinerja

Guru, Kepala Sekolah, dan

Pengawas. Direktorat Jenderal

Guru dan Tenaga Kependidikan.